



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**UNIT KERJA** : STAF AHLI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : EKO KURNIAWAN
2. Jabatan : STAF AHLI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
3. NHK : 627853

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 485.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m<sup>2</sup>/85 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANGKA, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000
2. Tanah Seluas 1.665 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANGKA, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
3. Tanah Seluas 289 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANGKA TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
4. Tanah Seluas 195 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANGKA TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5. Tanah Seluas 3.344 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANGKA TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 61.000.000

1. MOTOR, HONDA SPACY Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, YAMAHA LEXI Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOTOR, VESPA EXCLUSIVE Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	8.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	554.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	554.000.000

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.